



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
( Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 9 Februari 2023
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan tentang capaian dan upaya penanganan stunting sampai dengan tahun 2022. 2. Penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 dan program di tahun 2023.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dilanjutkan oleh Felly Estelita Runtuwene, S.E/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 26 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI : Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran; C. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) : Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibuka pukul 10.18 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk:
  - a. Melakukan penyelarasan indikator stunting berbasis surveilans pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan stunting dan;
  - b. Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk pendisiplinan pengisian data stunting bagi seluruh kabupaten/kota guna akurasi pencatatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memenuhi kebutuhan antropometri di seluruh posyandu dan USG di seluruh Puskesmas.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka membentuk Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah yang masuk dalam prevalensi dengan angka stunting tertinggi, agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk memberikan data yang akurat terkait:
  - a. Anggaran percepatan penurunan stunting tahun 2023 di setiap kementerian/lembaga terkait;
  - b. Anggaran percepatan penurunan stunting tahun 2023 per provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. Laporan penurunan stunting dari masing-masing kabupaten/kota; dan Laporan kegiatan aksi bergizi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.43 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN RI,



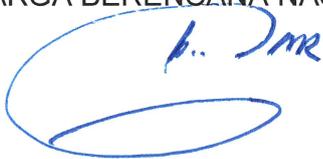
Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU.

KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.  
A-393

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



DR.(H.C).dr. HASTO WARDOYO, SP.OG(K).